

KARAKTERISTIK PERUSAHAAN YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN ITEM *VOLUNTARY* DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA

Arifin Sabeni
Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This research is aimed a) to identify the level of voluntary disclosure by using Voluntary Disclosure Index, and b) to analyze the firm's characteristics that have significant impact on disclosure level of each firm in certain industry. The Descriptive statistics and multiple regression analysis are used to examine these objectives, particularly for analyzing firm's characteristic (such as board of directors composition, the number of audit committee's member, firm's size, leverage, profitability, firm's operations, and the industry types) and their impact on the voluntary disclosure level. The results by using descriptive statistics show that the mining industry have the highest voluntary disclosure Index (VDI), followed by infra structure and transportation industry, then agriculture industry. The lowest of Voluntary disclosure index is property and real Estate industry. The results also show that the board of director composition, firm's size, firm's operation, and the industry types have the significant impact on the level of voluntary disclosure.

Key Words : Voluntary Disclosure Index; Firm's characteristics.

PENDAHULUAN

Perusahaan biasanya mengungkapkan informasi dalam laporan keuangannya yang hanya bersifat wajib saja. Ini ternyata dirasa masih kurang oleh pemakai laporan keuangan. Hal ini karena adanya tuntutan dari para investor dan pihak pemakai lainnya terhadap prinsip tanggung jawab sebagai bagian dari praktek *good corporate governance*. Untuk itu perlu disajikan juga informasi lain yang sifatnya sukarela atau *voluntary* dalam rangka memberikan informasi yang lebih lengkap. Praktek *voluntary disclosure* dalam laporan keuangan perlu diteliti dalam rangka

memperoleh bukti empiris, terutama tentang informasi apa yang bersifat *voluntary* dalam laporan keuangan dan faktor apa saja yang sekiranya dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela ini.

Pihak perusahaan, sebagai penyaji laporan keuangan, tentunya berharap bahwa informasi *voluntary* (sukarela) ini sesuai harapan pengguna, namun ini belum tentu terjadi. Akibatnya bisa saja terjadi informasi *voluntary* tersebut justru merupakan informasi yang kurang penting bagi pemakai dan sebaliknya informasi yang sangat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan

justru belum diungkapkan dalam *voluntary disclosure*. Beberapa karakteristik perusahaan ditengarai mempengaruhi tingkat *voluntary disclosure*, misalnya saja ukuran perusahaan, profitabilitas, susunan dewan komisaris, dan komite audit.

Berdasarkan uraian diatas, studi ini akan (a) menganalisis indeks *voluntary disclosure* masing-masing perusahaan dan antar industri, dan (b) mengidentifikasi beberapa karakteristik perusahaan yang mempengaruhi tingkat *voluntary disclosure*, dan (c) melakukan studi korelasi antara indeks *voluntary disclosure* dengan karakteristik perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Prinsip *full disclosure* yang harus dijalankan perusahaan publik sebenarnya merupakan bagian dari upaya menegakkan *good corporate governance*. OECD (2004) mengemukakan lima hal yang harus diupayakan dalam menegakkan terciptanya *good corporate governance*, yaitu : perlindungan terhadap hak pemegang saham, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, peranan stakeholder yang terkait dengan perusahaan, keterbukaan (*transparansi*), dan akuntabilitas dewan komisaris.

Lebih lanjut, pihak BAPEPAM melalui aturannya nomor 38 tahun 1996 berusaha lebih memperjelas aturan tersebut tentang hal-hal apa saja yang harus dirinci oleh

perusahaan publik dalam menerbitkan laporan tahunan mereka (Herwidayatmo, 2000). Laporan tahunan harus mencakup ikhtisar data keuangan penting perusahaan untuk periode lima tahun, analisis dan pembahasan oleh manajemen, penjelasan mengenai investasi/divestasi, transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan transaksi dengan pihak afiliasi serta laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Dalam kaitannya dengan *disclosure*, Penmann (1988) menyatakan terdapat dua jenis sifat informasi yang diungkapkan yaitu *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*. Informasi yang bersifat *mandatory disclosure* merupakan informasi yang harus diungkapkan dalam laporan karena memang oleh peraturan atau undang-undang diharuskan untuk disajikan. Sedangkan *voluntary disclosure* merupakan jenis informasi yang secara sukarela diungkapkan di dalam laporan keuangan yang bertujuan menambah kegunaan informasi mengenai kekayaan dan hasil operasi suatu perusahaan kepada para pemakai laporan keuangan.

Dari hasil penelitian terdahulu diperoleh hasil bahwa praktek *voluntary disclosure* ternyata sangat beragam antar negara. Chow dan Wong-Boren (1987) serta Meek et al (1995) menyatakan bahwa di Meksiko informasi mengenai laba unit bisnis (*profit by lines of business*) adalah wajib diungkapkan (*mandatory*), tetapi di Swedia

dan Perancis, informasi ini bersifat *voluntary*. Sebaliknya, di Swedia dan Perancis informasi tentang tanggungjawab sosial (*social responsibility*) perusahaan wajib diungkapkan, tetapi di Meksiko informasi tersebut masih bersifat sukarela. Perbedaan ini disebabkan peraturan tentang disclosure yang berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Di Indonesia, terdapat beberapa yg merupakan informasi yang diwajibkan, tetapi ada juga yang masih bersifat *voluntary*.

Berbagai penelitian dilakukan untuk meneliti seberapa besar kegunaan dari *voluntary disclosure*. Penelitian yang dilakukan Cooke (1992) terhadap laporan tahunan perusahaan publik di Jepang menemukan bahwa *voluntary disclosure* sangat dipengaruhi oleh jenis perusahaan. Jenis perusahaan manufaktur secara signifikan mengungkapkan lebih banyak informasi daripada jenis perusahaan Jepang yang lain.

Wallace et al (1994) di Spanyol, meneliti apakah perbedaan tingkat pengungkapan (*level of disclosure*) perusahaan dalam laporan tahunan mereka mencerminkan karakteristik perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan berhubungan secara positif dan signifikan dengan karakteristik perusahaan yaitu besar perusahaan (*size*) tetapi justru berhubungan negatif dengan tingkat likuiditas perusahaan. Temuan yang berbeda diungkapkan oleh Firth (1989)

yang meneliti praktek *voluntary disclosure* oleh perusahaan publik di Inggris. Dia menyatakan bahwa perusahaan yang berskala kecil di Inggris memiliki kecenderungan untuk lebih meningkatkan *voluntary disclosure* dalam laporan keuangannya agar dapat memperoleh sumber dana di pasar modal.

Di Indonesia sendiri belum banyak penelitian yang membahas mengenai *voluntary disclosure*. Arifin (2002) melakukan penelitian tentang prinsip full disclosure dalam laporan keuangan perusahaan publik dengan kualitas informasi akuntansi (relevan, reliabel, dan komparabel). Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip full disclosure dapat mendukung reliabilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan, namun tidak mendukung relevansi dan komparabilitas informasi akuntansi. Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Arifin (2003) tentang tingkat kepentingan (*degree of importance*) dari informasi yang bersifat *voluntary disclosure* dari persepsi pemakai (*users*) dan penyaji (*preparers*) laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemakai laporan (*users*) menilai 24 item *voluntary disclosure* memiliki derajat kepentingan yang tinggi, sedangkan penyaji atau manajemen (*preparers*) menilai hanya sejumlah 12 item.

Diharapkan hasil akhir penelitian ini dapat menjadi rumusan konsep kebijakan tentang aturan informasi yang harus dimuat

dalam laporan keuangan dalam rangka mewujudkan *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

METODA PENELITIAN

Untuk melakukan penghitungan indeks *voluntary disclosure*, dihitung melalui rasio antara skor yang diberikan kepada setiap perusahaan berdasarkan banyaknya item *voluntary* yang tercantum dalam laporan tahunannya (dalam hal ini diberi tanda V), dengan skor maksimum yang dapat diperoleh oleh perusahaan dalam satu industri (dalam hal ini diberi tanda M). Berdasarkan kedua skor tersebut, indeks *voluntary disclosure* ditentukan dengan cara yang konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Hossain et al., 1994). Sementara penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yang tidak dibobot (*unweighted approach*), maka pada penelitian ini menggunakan pendekatan *weighted approach*, yaitu dengan memberikan bobot tertimbang pada masing-masing item (Chow dan Wong-Boren, 1987 dan Arifin, 2003).

Beberapa langkah untuk meninentukan indeks *voluntary disclosure* masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian (*scoring*) terhadap item-item disclosure (V)

$$V = \sum_{i=1}^m di.WSi$$

dimana:

d = 1 jika item *di* diungkapkan, 0 jika item *di* tidak diungkapkan

WSi = bobot tertimbang skor tiap item

V = skor *voluntary disclosure* actual

2. Melakukan penilaian (*scoring*) terhadap nilai maksimum yang dapat diperoleh perusahaan (M)

$$M = \sum_{i=1}^n di.WSi$$

dimana:

di = item yang diharapkan untuk diungkapkan

WSi = bobot tertimbang skor tiap item

n = jumlah item yang diharapkan diungkapkan oleh perusahaan

3. Menghitung indeks *voluntary disclosure* = V/M

Hasil analisis yang diperoleh berupa model indeks *voluntary disclosure* untuk setiap perusahaan publik di Indonesia yang kemudian diklasifikasikan per golongan industri. *Level of voluntary disclosure* ditentukan berdasarkan index *voluntary disclosure*. Selain itu juga dilakukan analisis antar sektor industri untuk mengetahui perbedaan *voluntary disclosure* perusahaan pada sektor industri yang satu dengan yang lainnya.

Metode analisis dilakukan melalui analisis regresi berganda (*multiple regression*) untuk mencari pengaruh karakteristik

perusahaan dan jenis industri terhadap *level of voluntary disclosure*. Model persamaan regresi yang dikembangkan adalah:

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 D_i + e$$

Keterangan :

Y = *Level of voluntary disclosure*

β = Konstanta

β_{1-7} = Koefisien regresi

X_1 = Komposisi dewan direksi

X_2 = Komite audit

X_3 = Ukuran perusahaan

X_4 = Profitabilitas

X_5 = Leverage

X_6 = Operasi perusahaan

$X_7 D_i$ = D1 = pertanian

D2 = pertambangan

D3 = kimia dasar

D4 = lain-lain

D5 = barang konsumsi

D6 = properti dan real estat

D7 = infrastruktur

D8 = perdagangan dan jasa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel

Berdasarkan hasil survei, jumlah perusahaan yang terdaftar pada BAPEPAM dan laporan keuangannya yang digunakan sebagai responden dan tersedia di Bursa Efek Indonesia, dirinci dengan menggunakan klasifikasi menurut PT. BEI sebagai berikut :

Tabel 1 Profil Perusahaan Berdasarkan Jenis Industri

No.	Jenis Industri	Jumlah	%
1.	Pertanian & Perkebunan	8	3.25
2.	Pertambangan	4	1.63
3.	Industri Dasar dan kimia	44	17.89
4.	Aneka Industri	33	13.41
5.	Industri barang konsumsi	32	13.01
6.	Properti, Real Estate & Bangunan	26	10.57
7.	Infrastruktur, Sarana dan Transportasi	13	5.28
8.	Keuangan & Perbankan	49	19.92
9.	Perdagangan, jasa, dan Investasi	37	15.04
Total		246	100.00

Sumber: The Jakarta Stock Exchange, 2010

Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa terdapat 246 perusahaan yang menjadi responden dan dibagi kedalam 9 (sembilan) jenis industri. Dalam tabel tersebut juga dapat dilihat jumlah perusahaan pada masing-masing

jenis industri dan prosentase setiap jenis industri dari total perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini.

Setelah memperoleh jumlah perusahaan dan laporan tahunan dari setiap

perusahaan, kemudian VDI dianalisis dengan melalui pendekatan bobot item (*weighted approach*). Dengan menggunakan observasi dan pengamatan langsung satu per satu setiap perusahaan, dilakukan penghitungan indeks

voluntary disclosure sesuai rumus di atas.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil penghitungan VDI setiap industri :

**Tabel 2 Statistik Deskriptif untuk
Level of Voluntary Disclosure Index
Per Jenis Industri**

Jenis Industri	Jumlah	Voluntary Disclosure Index		Voluntary Disclosure Index (VDI)	
		Mean	Std. Dev.	Min.	Max.
Pertanian & Perkebunan	8	.384	.104	.250	.541
Pertambangan	4	.465	.170	.360	.720
Industri Dasar dan kimia	44	.309	.111	.168	.600
Aneka Industri	33	.325	.115	.170	.667
Industri barang konsumsi	32	.317	.142	.150	.670
Properti, Real Estate & Bangunan	26	.242	.008	.098	.480
Infrastruktur, Sarana dan Transportasi	13	.400	.116	.196	.529
Keuangan & Perbankan	49	.339	.105	.180	.640
Perdagangan, jasa, dan Investasi	37	.359	.163	.160	.720
Total	246	.328	.127	.098	.720

Sumber data primer, 2010

Tabel 2 menunjukkan *mean score*, *standard deviation*, dan rentangan VDI (*voluntary disclosure index*) untuk setiap jenis industri. VDI berkisar 0.098 sampai 0,720 dan kisaran mean scores per jenis industri dari 0,242 sampai 0,456. Dalam tabel 2 di atas dapat juga dilihat tiga jenis industri yang memiliki *mean score* VDI yang tertinggi, yaitu industri pertambangan (0,465); diikuti oleh industri infrastruktur, prasarana dan tranpostasi (0,400), dan industri pertanian

& perkebunan (0,384). Memang dalam realitanya tiga jenis industri ini memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Perkembangan dari ketiga industri ini memerlukan tambahan investasi yang besar sehingga salah satu cara untuk menarik dana dari para pemodal adalah memberikan informasi tentang kinerja mereka kepada calon penanam modal dengan melalui *voluntary disclosure* dalam laporan tahunannya.

Langkah berikutnya yang telah ditempuh adalah masing-masing perusahaan yang go-public kemudian diidentifikasi dan ditentukan karakteristiknya

Tabel 3 di bawah ini menunjukkan main-masing variabel. Komposisi dewan komisaris yang diukur dari perbandingan antara anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang ada. Variabel ini dipilih karena untuk menegakkan prinsip *Good Corporate Governance*, keberadaan anggota dewan komisaris dari luar perusahaan akan dapat

mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas laporan tahunan perusahaan. Semakin tinggi proporsi anggota dewan komisaris dari luar perusahaan akan dapat menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Variabel kedua yang dipilih adalah ukuran (size) perusahaan. Variabel ini diukur dengan jumlah karyawan perusahaan. Semakin banyak jumlah karyawan perusahaan semakin besar pula tanggungjawab perusahaan terhadap merkea sehingga diharapkan responsibilitas perusahaan (sebagai salah satu prinsip *Good Corportae Governance*) akan semakin baik.

Tabel 3 Statistik Deskriptif untuk Komposisi Dewan Komisaris dan Jumlah Karyawan

Jenis Industri	Jumlah	Komposisi dewan Komisaris		Jumlah Karyawan	
		Mean	Std. Dev.	Mean	Std. Dev.
Pertanian & Perkebunan	8	.457	.303	6,590	10,100
Pertambangan	4	.750	.300	3,370	2,014
Industri Dasar dan kimia	44	.390	.408	3,072	3,842
Aneka Industri	33	.348	.374	5,049	11,713
Industri barang konsumsi	32	.558	.371	5,882	11,343
Properti, Real Estate & Bangunan	26	.416	.366	734	659
Infrastruktur, Sarana dan Transportasi	13	.673	.385	4,708	11,651
Keuangan & Perbankan	49	.586	.429	1,989	4,209
Perdagangan, jasa, dan Investasi	37	.386	.369	2,845	4,784
Total (average)	246	.470	.397	3,412	7,489

Sumber : data primer, 2010

Tabel 3 di atas menunjukkan mean score dari variabel komposisi dewan komisaris yaitu sebesar 47%. Ini berarti bahwa setiap industri, memiliki 47% dari anggota dewan komisaris berasal dari luar (komisaris independen). Tabel 3 di atas juga menunjukkan

bahwa industri pertambangan memiliki angka tertinggi komposisi dewan komisaris (75 %). Ini menunjukkan bahwa sebanyak 75 % dari anggota dewan komisaris perusahaan untuk jenis industri pertambangan berasal dari luar perusahaan.

Untuk jumlah karyawan perusahaan, industri Pertanian & Perkebunan memiliki jumlah karyawan yang terbesar, yaitu rata-rata sebanyak 6.530 orang, kemudian diikuti oleh industri barang kebutuhan sehari-hari

rata-rata sebanyak 5.882 orang dan urutan ketiga adalah aneka industri dengan jumlah karyawannya rata-rata 5.049 orang. Rata-rata jumlah karyawan untuk semua industri adalah 3.412 orang.

Tabel 4 Statistik Deskriptif untuk Jumlah Anggota Komite Audit Dan Operasi Perusahaan

Jenis Industri	Jumlah	Anggota Komite Audit		Operasi Perusahaan (Multinasional)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian & Perkebunan	8	5	62.50	5	62.50
Pertambangan	4	3	75.00	3	75.00
Industri Dasar dan kimia	44	16	36.40	20	45.40
Aneka Industri	33	9	27.30	18	41.90
Industri barang konsumsi	32	19	59.30	20	62.50
Properti, Real Estate & Bangunan	26	6	23.10	1	3.80
Infrastruktur, Sarana dan Transportasi	13	7	53.80	5	38.50
Keuangan & Perbankan	49	34	69.40	11	22.40
Perdagangan, jasa, dan Investasi	37	14	37.80	11	29.70
Total	246	113	45.93	94	38.20

Sumber : data primer, 2010

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa dari 246 perusahaan di BEI yang memiliki anggota komite audit lebih dari 2 berjumlah 113. Tabel di atas juga menunjukkan jumlah perusahaan yang beroperasi skala multinasional hanya berjumlah 98 (38,20 %) karena memanga

bila dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, pasar modal di Indonesia masih dapat dikategorikan dalam masa awal pertumbuhan (*early stage*), disamping karena adanya krisis ekonomi dan kondisi politik yang masih kurang stabil.

Tabel 5 Statistik Deskriptif Untuk Leverage and Profitabilitas

Jenis Industri	Jumlah	Leverage		Profitabilitas	
		Mean	Std. Dev.	Mean	Std. Dev.
Pertanian & Perkebunan	8	2.161	2.453	.540	1.383
Pertambangan	4	0.449	0.421	.490	0.754
Industri Dasar dan kimia	44	1.097	3.589	.008	0.620
Aneka Industri	33	3.958	5.894	-.127	1.140

Industri barang konsumsi	32	2.151	6.925	-.003	0.560
Properti, Real Estate & Bangunan	26	5.568	9.221	.004	0.347
Infrastruktur, Sarana dan Transportasi	13	2.401	3.562	.497	1.654
Keuangan & Perbankan	49	5.746	9.370	.154	0.388
Perdagangan, jasa, dan Investasi	37	2.978	9.192	-.728	4.507
Total	246	3.392	7.416	-.002	1.901

Sumber : data primer, 2010

Tabel 5 di atas menunjukkan mean score dari rasio leverage (perbandingan antara nilai buku hutang dengan ekuitas) dari total industri adalah 3,392. Dapat dilihat juga bahwa industri pertambangan memiliki rasio leverage yang paling kecil (0,421). Tabel 5 juga menunjukkan rasio profitabilitas (rasio antara laba bersih dengan total aset) rata-ratanya adalah sebesar - 0,002.

Uji Statistik

Setelah memperoleh data baik data untuk variabel bebas maupun variabel tidak bebas, kemudian akan diuji hubungan diantara

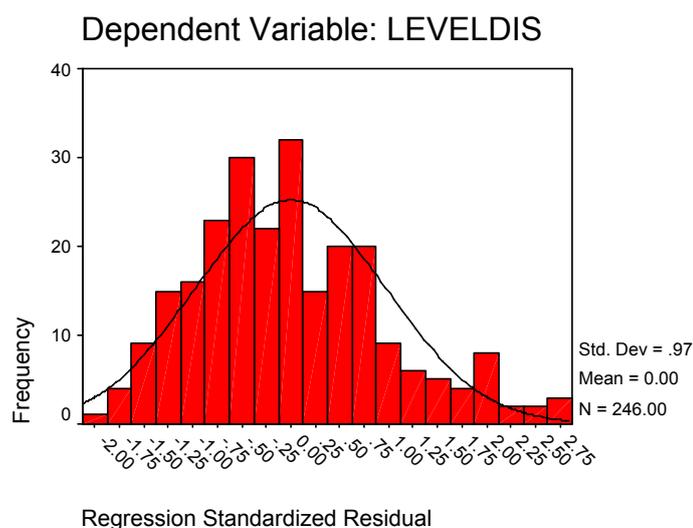
mereka. Teknik analisis yang digunakan adalah ‘multiple regression’ dengan hasilnya tampak dalam gambar halaman berikutnya.:

Sebelum dilakukan analisis dengan multiple regression, harus diuji dahulu apakah data yang ada memenuhi asumsi klasik, yaitu normality, autocorrelation, *multicollinearity*, dan *heteroscedasticity* (Gujarati, 2004).

Uji Normalitas Data.

Untuk menguji normalitas data dapat dilihat melalui grafik histogram dengan menggunakan SPSS yang hasilnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

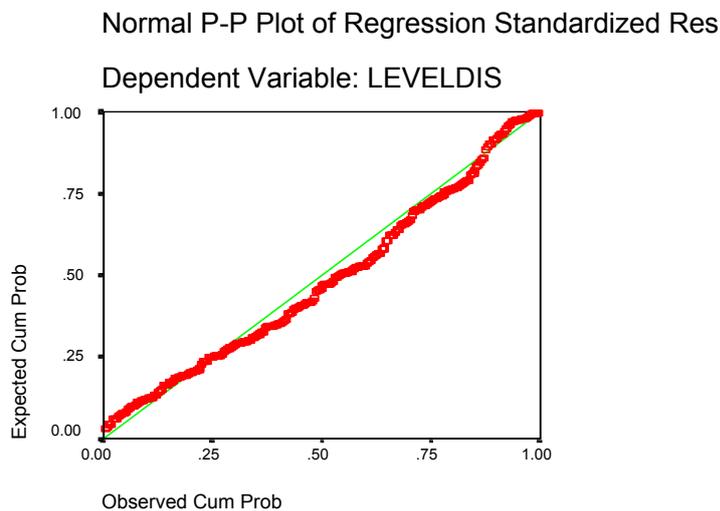
Gambar 1 Uji Distribusi Normal Histogram



Berdasarkan gambar 1 di atas, tampaklah bahwa distribusi data menyebar disekitar kurve normal dan ini menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi normal. Cara

lainnya untuk menguji normalitas data adalah menggunakan the normal probability plots yang hasilnya tampak dalam gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Normal P-Plot



Gambar 2 di atas juga menunjukkan bahwa distribusi data menyebar di sepanjang garis diagonal sehingga mengindikasikan data yang ada memenuhi asumsi normalitas data (Hair, 2008).

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi apakah terdapat autokorelasi data, digunakan uji Durbin-Watson (DW). Bila hasil dari uji DW

menunjukkan angka antara 1,4 dan 2,6, maka tidak ada autokorelasi. Tetapi jika sebaliknya maka ada autokorelasi.

Nilai dari DW dapat dilihat pada hasil uji dengan menggunakan program SPSS yang nilainya dicerminkan oleh coefficient of determination (R^2) dan Standard Error Estimation (SEE). Tabel 6 berikut ini menunjukkan hasil uji dengan program SPSS :

Tabel 6 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.521 ^a	.271	.227	.11236	2.061

a. Predictors: (Constant), XTRDSERV, LEVRG, EMPLOYE, FIRMOP, XINFTRAN, XMINNG, PROFIT, XAGRI, BDIRECT, XMISCEL, XPROPREA, XCGOOD, AUDCOM, XBASCHEM

b. Dependent Variable: LEVELDIS

Dari tabel 6 di atas, nilai DW adalah 2,061 yang terletak antara 1.40 dan 2.60. Ini berarti bahwa tidak ada autocorrelation diantara berbagai variabel. Tabel di atas juga menunjukkan koefisien regresi adalah 0,227 (nilai adjusted R²). Ini berarti bahwa sebanyak 22,70% dari voluntary disclosure level (sebagai variabel dependen) dapat dijelaskan oleh variasi dari independen variabel,

sedangkan sisanya (77,30%) dijelaskan oleh variabel-variabel yang lainnya.

Untuk menentukan apakah semua variabel dependen yang ada dalam persamaan regresi secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen, digunakan uji simultan (F-test). Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji tersebut :

Tabel 7 Uji Goodness of the Model

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.084	14	7.746E-02	6.135	.000 ^a
	Residual	2.916	231	1.263E-02		
	Total	4.001	245			

a. Predictors: (Constant), XTRDSERV, LEVRG, EMPLOYE, FIRMOP, XINFTRAN, XMINNG, PROFIT, XAGRI, BDIRECT, XMISCEL, XPROPREA, XCGOOD, AUDCOM, XBASCHEM

b. Dependent Variable: LEVELDIS

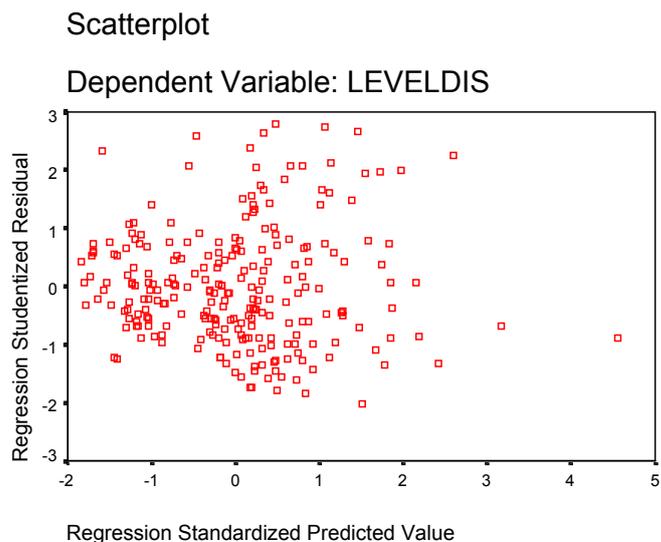
Dari tabel 7 di atas, tampak bahwa nilai F = 6,135, sedangkan nilai observed probability adalah 0,000. Karena nilai the probability of the ANOVA test di bawah 0,05, berarti semua variabel bebas (yaitu komposisi dewan direksi, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, operasi perusahaan, dan jenis industri) secara bersama-

sama (simultan) dapat mempengaruhi variabel terikat (level of voluntary disclosure).

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi apakah ada heteroskedastisitas atau tidak, dengan menggunakan program SPSS hasil ujinya tampak dalam Grafik Scatter plot seperti gambar di bawah ini :

Gambar 3 Uji Heteroskedastisitas



Dalam gambar tersebut di atas dapat dilihat bahwa sebaran data tidak membentuk pola tertentu dan data menyebar di sekitar angka nol. Ini mengindikasikan bahwa data yang digunakan bebas dari heteroskedastisitas (Hair, 1998 dan Gujarati, 1995).

d. Uji Multikolinearitas.

Apakah ada multikol atau tidak dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation

Factor) dan nilai Tolerance. Gujarati (1995) dan Hair (1998) menyatakan bahwa model regresi akan bebas dari multikol jika (a) nilai VIF lebih kecil dari 10, dan, (b) nilai Tolerance lebih besar dari 0,1.

Nilai VIF dan Tolerance dapat dilihat dalam tabel hasil olahan program SPSS berikut ini :

Tabel 8 Partial Coefficient and Test for Multicollinearity

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.270	.021		12.738	.000	
	BDIRECT	5.230E-02	.021	.163	2.524	.012	.761
	AUDCOM	1.696E-02	.018	.066	.965	.336	.669
	EMPLOYE	3.488E-06	.000	.204	3.492	.001	.920
	LEVRG	1.062E-03	.001	.062	1.054	.293	.923
	PROFIT	7.662E-04	.004	.011	.199	.843	.958
	FIRMOP	6.323E-02	.017	.243	3.639	.000	.709
	XAGRI	7.044E-03	.045	.010	.158	.875	.819
	XMINNG	8.284E-02	.059	.082	1.394	.165	.908
	XBASCHEM	-2.94E-02	.025	-.088	-1.160	.247	.543
	XMISCEL	-2.57E-02	.028	-.069	-.915	.361	.559
	XCGOOD	-5.39E-02	.027	-.142	-1.966	.050	.603
	XPROPREA	-6.44E-02	.028	-.155	-2.285	.023	.683
	XINFTRAN	4.243E-02	.036	.074	1.187	.236	.803
	XTRDSERV	2.949E-02	.026	.083	1.147	.252	.608

a. Dependent Variable: LEVELDIS

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF dan Tolerance masing-masing lebih kecil dari 10 dan lebih besar dari 0,1. Ini berarti bahwa semua variabel yang digunakan dalam model ini bebas dari multikolinearitas.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 variabel yang secara signifikan ($p < 0.01$ dan $p \leq 0.05$) berpengaruh terhadap level of VD. Variabel tersebut adalah komposisi dewan komisaris (X1), Ukuran perusahaan (X3), operasi perusahaan (X6), dan jenis industri (x7).

Nilai $p = 0,012$ untuk variabel komposisi dewan komisaris memberikan bukti bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan menambah jumlah item Voluntary yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Hasil ini membuktikan bahwa adanya anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (kebanyakan para profesional yang terdiri dari akademisi, ahli hukum, pejabat pemerintah, dan juga para akuntan) dapat mengefektifkan kontrol atas manajemen dan membantu manajemen dalam mengatasi kesulitan keuangan (Daily and Dalton, 2004). Selain itu, adanya anggota dewan komisaris dari luar dapat mengurangi kecurangan keuangan yang dilakukan oleh manajemen (Beasley, 1996).

Variabel ukuran perusahaan juga memiliki nilai signifikansi $p = 0,001$ yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan semakin banyak item

Voluntary yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Temuan ini konsisten dengan temuan para peneliti terdahulu (misal Chow & Wong-Boren, 1987; Cooke, 1991; Hossain et al., 1994). Ketika perusahaan tumbuh semakin besar, para pemegang saham tersebar di berbagai lokasi dan juga diikuti oleh banyaknya karyawan perusahaan. Mereka semua tentunya ingin mengetahui informasi yang berhubungan dengan perusahaan. Manajer perusahaan besar biasanya menggunakan cara penyajian melalui voluntary disclosure dalam rangka menambah lengkapnya informasi yang disajikan (misal informasi tentang aktivitas-aktivitas sosial, kesejahteraan karyawan, dan pemberian sponsor untuk kegiatan-kegiatan masyarakat sekitar). Informasi jenis ini biasanya tidak akan tampak dalam item *Mandatory*.

Demikian juga untuk variabel skala operasi perusahaan yang menunjukkan nilai $p=0,00$ mengindikasikan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam skala multinasional akan lebih banyak mengungkapkan item voluntary daripada yang berskala domestik. Alasan yang mendasarinya adalah karena operasinya meliputi beberapa negara, manajer perusahaan memiliki banyak informasi dari cabang-cabangnya di berbagai negara. Disamping itu sebaran pemegang saham dan stakeholder yang meliputi beberapa negara mempengaruhi pula tingkat VD karena mereka menginginkan informasi operasi

perusahaan pada negara masing-masing dan manajemen perusahaan berusaha untuk memberikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang ditemukan oleh Choi dan Muller (1992); dan Meek et.al. (1995).

Selanjutnya untuk variabel jenis industri, terdapat dua industri yang secara signifikan mempengaruhi level of VD, yaitu industri barang konsumsi dan industri property dan real estat, yang masing-masing memiliki nilai $p = 0,050$ dan $p = 0,023$. Argumennya adalah selama beberapa tahun terakhir, dampak dari krisis ekonomi masih dirasakan oleh industri ini. Untuk bertahan hidup, mereka berusaha keras untuk memelihara struktur modalnya dan juga berusaha menjaga kepercayaan para investor serta meyakinkan mereka bahwa modal yang ditanamkan di perusahaan masih dikelola dengan baik. Untuk itu dalam laporan tahunannya, perusahaan sering menambahkan informasi lain di luar informasi keuangan untuk memper jelas hasil kinerja mereka agar para pemegang saham tidak ragu atau khawatir akan modal yang mereka tanamkan dalam perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Industri pertambangan dengan mean score VDI 0,465 adalah industri yang memiliki Index (VDI) yang tinggi, diikuti oleh industri infrastruktur, prasarana dan transportasi

(0,400), dan industri pertanian & perkebunan (0,384). Perkembangan dari ketiga industri ini memerlukan tambahan investasi yang besar sehingga salah satu cara untuk menarik dana dari para pemodal adalah memberikan informasi tentang kinerja mereka kepada calon penanam modal dengan melalui voluntary disclosure dalam laporan tahunannya. Dengan adanya VDI yang tinggi menunjukkan bahwa ketiga jenis industri ini memiliki komitmen untuk menyajikan secara terbuka (transparan) informasi yang dimilikinya kepada masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya niat baik dari perusahaan untuk fair (adil) dalam penyajian informasi yang disajikan dalam laporan keuangannya. Fair dalam hal ini adalah menyajikan informasi secara adil, tidak membedakan golongan atau kelompok tertentu dari pemakai laporan keuangannya. Dengan demikian, adanya praktik voluntary disclosure menjadi salah satu faktor pendukung dalam menegakkan prinsip Good Corporate Governance, khususnya prinsip Keterbukaan (Transparency) dan prinsip Keadilan (fairness).

Hasil penelitian ini juga menghasilkan tujuh variabel bebas (komposisi dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, skala operasi perusahaan, dan jenis industri) secara bersama-sama mempengaruhi tingkat Voluntary Disclosure perusahaan publik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa

prinsip Good Corporate Governance, khususnya prinsip Transparansi dan Fairness, sudah dipraktikkan oleh perusahaan publik Indonesia melalui cara voluntary disclosure dalam laporan tahunannya. Dari tujuh variabel yang digunakan dalam penelitian ini, hanya 4 variabel saja yang berpengaruh secara signifikan, yaitu komposisi dewan komisaris, ukuran perusahaan, skala operasi perusahaan, dan jenis industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, 2002, *Prinsip Full-Disclosure Sebagai Pendukung Kualitas Informasi Akuntansi*. Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arifin, 2003, Consensus Between Users and Preparers on the Importance of *Voluntary disclosure* Items in Annual Reports: An Indonesian Study. *Proceeding Asian Academy Management Conference*, Johor Bahru, Malaysia.
- Beasley, M.S., 1996. "An Empirical Analysis of the Relation Between the Board Directors Composition and Financial Statement Fraud". *The Accounting Review*. Vol. 71. Pp. 443 – 465.
- Choi, F.D.S. and Mueller, G.G. 1992. *International Accounting*. New York, Prentice Hall.
- Chow, CW dan A. Wong-Boren, 1987, "Voluntary Financial Disclosure by Mexican Corporation", *Accounting Review*, 62, July, pp.533-541.
- Cooke, T.E., 1991, "Disclosure in the Corporate Annual reports of Swedish Companies", *Accounting and Business Research*, 19, Spring, pp. 113-124.
- _____, 1992, "The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed Corporations", *Accounting and Business Research*, 22, Summer, pp. 229-237.
- Daily, C.M. and Dalton, D.R. 2004. "Bankruptcy and Corporate Governance: The Impact of Board Composition and Structure". *Academy of Management Journal*. Vol. 37.
- Firth, Michael.1989. The Impact of Size, Stock Market Listing and Auditors on *Voluntary disclosure* in Corporate Annual Reports. *Accounting and Business Research*. Autumn. Vol. 9. Hal. 276-280.
- Gujarati, Damodar N. 2004. *Basic Econometrics*. Edisi ke 4 McGraw Hill, New York.
- Hair, J.E.; Anderson, R.E. Tratham, R.L. dan Black, W.C. 2008. *Multivariate Data Analysis*. 7th Edition, Prentice Hall International Inc.
- Hendriksen, Eldon S., dan Michael Van Breda, 2006, *Accounting Theory*, 7th edition, Irwin-McGraw-Hill
- Hossain, M. Tan, LM and Adams S 1994. Voluntary Disclosure in an Emerging Capital Market : Some Empirical Evidence from Companies Listed on the Kuala Lumpur Stock Exchange. *The International Journal of Accounting*. Vol. 29. Hal. 334-351.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat Jakarta

- Meek, Gary K., Clare B. Roberts, Sydney J. Gray, 1995, "Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures By US, UK, and Continental European Multinational Corporations", *Journal of International Business Studies*, Third Quarter, pp. 555-572.
- Organization for Economic Co-operation and Development. 2004. *Principles of Corporate Governance*. Paris.
- Penmann, SH.1988. "An Empirical Investigation of the Voluntary Disclosure of Corporate Earning Forecasts. *Journal of Accounting Research*. Vol. 18. Spring. Hal. 132-160.
- Wallace, R.S., Olusegun, Kamal naser, dan Aracelu Mora, 1994, "The Relationship Between the Comprehensiveness of Corporate Annual Reports and Firm Characteristics in Spain", *Accounting and Business research*, Vol. 25, No. 97, pp. 41-53